



GRAHA ILMU

BUKU 
UNTUK INDONESIA

**Apridar
Kusnadi
Ary Wahyono
Masyhuri Imron
Edi Susilo
Lathiful Khuluq**

Penyunting: Arif Abdulrahkim



Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

***Pemberdayaan Nelayan
& Pembangunan Maritim di Indonesia***

TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

*Nyiur hijau di tepi pantai
Siar-siar daunnya melambai
Padi mengembang kuning merayu
Burung-burung bernyanyi gembira*

*Tanah airku tumpah darahku
Tanah yang subur kaya makmur
Tanah airku tumpah darahku
Tanah yang indah permai nyata*

(Lagu Nyiur Hijau – Pencipta: Maladi)



GRAHA ILMU



GRAHA LITERATA

www.grahailmu.co.id



ISBN: 978-602-262-481-3



9 786022 624813 >

Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai; Pemberdayaan Nelayan & Pembangunan Maritim di Indonesia

*Penulis: Apridar; Kusnadi; Ary Wahyono; Masyhuri Imron;
Edi Susilo; Lathiful Khuluq*

Penyunting: Arif Abdulrahkim

Hak Cipta © 2015 pada penulis



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-4462135; 0274-882262; Fax: 0274-4462136

E-mail: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Buku ini diterbitkan atas kerjasama Penerbit Graha Ilmu dengan Penerbit Graha Literata

'Buku untuk Indonesia; Tidak diperjualbelikan'.

ISBN: 978-602-262-481-3

Cetakan Pertama, tahun 2015

BUKU UNTUK INDONESIA

Sumbangan Pemikiran Dunia Pendidikan untuk Indonesia

Sebuah buku berisi kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh Penerbit Graha Ilmu yang bekerja sama dengan para penulis dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Sebuah gerakan penyebaran ilmu pengetahuan sebagai wujud tanggung jawab sosial, baik penerbit maupun penulis.

Sebuah buku yang tidak diperjualbelikan, tetapi dibagikan secara cuma-cuma kepada semua pihak terkait yang memerlukannya. Dalam satu tahun akan diterbitkan sebanyak enam buku dengan tema yang beragam. Tema-tema yang diagendakan bagi *Buku untuk Indonesia* tahun 2015, bisa dilihat di www.grahailmu.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENYUNTING	vii
DAFTAR ISI	xv
PEMBANGUNAN MARITIM; PELUANG DAN TANTANGAN	
<i>Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.</i>	1
REVITALISASI KEANGGOTAAN NELAYAN DALAM KOPERASI LEPP-M3 NUSA BARONG SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN SOSIAL- EKONOMI BERKELANJUTAN	
<i>Kusnadi</i>	21
MASALAH PERIKANAN DI DAERAH PERBATASAN: MULAI DARI KONFLIK WILAYAH TANGKAP, ILLEGAL FISHING DAN SOLUSI MENGHADAPI NELAYAN ASING	
<i>Ary Wahyono</i>	47

MENCARI ALTERNATIF STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN	93
<i>Masyhuri Imron</i>	93
PEMBANGUNAN SPESIFIK LOKASI DAN ADAPTOR SOSIAL UNTUK NELAYAN	127
<i>Edi Susilo</i>	127
PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN NELAYAN	163
<i>Lathiful Khuluq</i>	163

-oo0oo-

PEMBANGUNAN MARITIM; PELUANG DAN TANTANGAN

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.

Guru Besar Ekonomi & Rektor Universitas Malikussaleh, Aceh

Pengantar

Joko Widodo (Jokowi) resmi menjadi presiden ketujuh bangsa maritim ini. Masa kerja seratus hari pertama telah berakhir. Menuju masa panjang sampai akhir masa jabatan lima tahun mendatang, pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya telah menanti. Selama empat dekade terakhir, pembangunan ekonomi menitikberatkan pada industrialisasi dengan bertumpu pada prinsip keunggulan komparatif dan memfokuskan diri pada keunggulan kompetitif. Masing-masing konsep pembangunan itu dikembangkan Widjojo Nitisastro dan Presiden RI ke-3, B.J. Habibie. Kedua tokoh itu sangat dekat dengan pemerintahan Soeharto.

Dalam konsep pembangunan komparatif, Widjojo menggunakan sepenuhnya teori Ricardian tentang perdagangan internasional dan industrialisasi. Kelompok ini menekankan pentingnya stabilitas ekonomi makro dan keterbukaan ekonomi Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sedangkan B.J. Habibie sebagai kaum teknolog mengagas konsep teknologi dan sumber daya manusia bisa mendukung investasi (modal) dan tenaga kerja. Dengan demikian, pada

akhirnya akan menghasilkan nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat.

Dua orang dekat pemerintahan Orde Baru ini memengaruhi kebijakan ekonomi nasional kala itu. Pada praktiknya, kedua konsep ekonomi yang dikembangkan "orang dekat" presiden kedua Indonesia itu saling melengkapi. Bukan saling jegal dan menghujat.

Konsep pengembangan ekonomi berbasis teknologi dilanjutkan pada masa Presiden B.J. Habibie, Gusdur dan Megawati Soekarno Putri sebagai pendukung utama perkembangan ekonomi nasional. Megawati sendiri menambahkan konsep pengembangan ekonomi berbasis "wong cilik", mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kebijakan ini diambil dari melihat realitas krisis ekonomi global dimana ekonomi makro tak mampu bertahan, sebaliknya sektor mikro kukuh dan tetap beroperasi. Hanya, UMKM-lah yang mampu bertahan dan membuat perekonomian Indonesia tak selimbung perekonomian Amerika, Inggris dan negara besar lainnya saat "badai" moneter melanda sejumlah kawasan di dunia. Kebijakan Megawati di sektor UMKM diteruskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengucurkan program pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari presiden sebelumnya, bangsa ini melupakan potensi kelautan yang dimiliki. Sebagai negara kepulauan, sejatinya Indonesia memfokuskan diri untuk mengembangkan ekonomi kelautan.

Dari visi dan misi yang disampaikan Jokowi-JK, pasangan ini memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan potensi laut. Salah satu gagasan Jokowi yang paling populer selama masa kampanye adalah "tol laut". Bahkan, sesaat setelah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK mengucapkan pidato politiknya pertama kali di atas Kapal Pinisi. Peristiwa politik ini bisa ditafsirkan sebagai wujud bahwa dua tokoh bangsa itu ingin memulai kinerjanya dari laut serta menyadari bahwa bangsa ini memiliki kekayaan terpendam di dasar laut nusantara.

Idealnya, presiden harus memiliki kemauan untuk mengoptimalkan hasil laut dan mengolahnya, bukan malah menguras laut tanpa batas. Presiden harus menegakkan supremasi hukum, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempersiapkan generasi sebagai upaya regenerasi kepemimpinan nasional.

Sebagai daerah kepulauan, luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² terdiri dari 2,8 juta km² perairan

pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif, 0,3 juta km² perairan teritorial dan 17.500 pulau.

Dari luas ini, laut Indonesia diperkirakan menghasilkan Rp 7.200 triliun per tahun atau empat kali lipat APBN 2014 (Rp 1.800 triliun). Selain itu, data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan luas lahan untuk budidaya laut mencapai 4,58 juta km². Dari jumlah itu, baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan. Artinya, kita menafikan kekayaan laut yang melimpah, yang merupakan anugerah Sang Pencipta. Jika diibaratkan manusia, usia bangsa ini telah renta. Idealnya, persoalan kelautan telah selesai dan kini rakyat pesisir pantai telah hidup makmur. Tak lagi kelaparan dililit utang pemberian tengkulak di tempat pendaratan ikan.

Bangsa ini juga alpa terhadap pengamanan laut sehingga riwayat pencurian ikan terus berlangsung setiap hari. Diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 100 triliun per tahun dari pencurian hasil laut oleh negara lain. Kerugian akibat pencurian rumput laut dan kerusakan terumbu karang sekitar Rp 12 triliun per tahun.

Kondisi ini disebabkan minimnya armada pengamanan laut. Lihat saja Singapura yang hanya memiliki 5 juta penduduk memiliki enam kapal selam untuk mengamankan lautnya. Sebaliknya, bangsa dengan 240 juta jiwa penduduk ini hanya memiliki dua kapal selam (*Republika*, 17 Desember 2014). Sebuah ironi yang belum teratasi.

Untuk itu, presiden baru sepatutnya membuat kebijakan pro kelautan. Kebijakan nyata, bukan sekadar dialektika dalam forum ilmiah dan *talk show* televisi atau terketik rapi dalam visi dan misi, tetapi minim realisasi ketika memimpin negeri.

Misalnya, presiden baru bisa mendorong pemanfaatan budidaya laut secara maksimal, mengeksplor hasil laut setengah jadi atau jadi ke luar negeri. Dengan demikian, nilai ekspor Indonesia terdongkrak dari tahun lalu yang hanya U\$\$ 2,85 miliar.

Potensi Laut

Tuhan menakdirkan Indonesia sebagai negara kepulauan nomor satu dan terbesar di dunia. Posisi geografis terhimpit di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik membuat potensi laut Indonesia tak terbantahkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menghitung potensi laut Indonesia tak kurang dari Rp 7.200 triliun per tahun. Saat ini, baru tergarap Rp 225 triliun per tahun atau sekitar 7,5%. Jumlah itu berasal dari perikanan, bioteknologi, transportasi laut, wisata bahari dan wilayah pesisir. Meminjam istilah Dedy Heryadi Sutisna (2012), potensi laut dapat diibaratkan *sleeping giant* (raksasa sedang tidur). Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membangunkan dan menggerakkan "raksasa tidur" itu secara masif dan berkelanjutan.

Di sektor pertambangan, data geologi menunjukkan, Indonesia memiliki 60 cekungan yang mengandung minyak dan gas bumi. Cekungan terbesar menyimpan kekayaan minyak dan gas adalah cekungan di perairan Simeulu, Aceh, yang hingga kini belum dieksplorasi. Bahkan, cekungan ini menyimpan cadangan minyak yang setara dengan produksi minyak Arab Saudi saat ini (Yarmen Dinamika, 2013).

Empat puluh cekungan lainnya terdapat di lepas pantai, 14 diantaranya berada di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya enam saja yang berada di daratan (Rochmin Dahuri, 2012). Dari data ini, diperkirakan mempunyai potensi sebesar 11,3 miliar barel yang terdiri atas 5,5 miliar barel berupa cadang-

an potensial dan 5,8 barel cadangan terbukti. Selain itu, diperkirakan cadangan gas bumi sebanyak 1.017 triliun kaki kubik terdiri dari cadangan terbukti 64,4 triliun dan cadangan potensial 37,3 triliun kaki kubik. Cadangan ini belum termasuk cekungan Simeulu di Aceh.

Dilema Pesisir

Setidaknya, ada dua kementerian terkait pembangunan pesisir, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Desa dan Transmigrasi.

Saat ini, jumlah desa pesisir sebanyak 10.664 dari total 75.410 desa di Indonesia atau sekitar 14 persen (BPS, 2011). Dalam konteks UU No. 6/2004 tentang Desa, maka kedaulatan pembangunan desa pesisir terdapat di tangan pemerintahan desa. Desalah yang menyusun rencana prioritas pembangunannya, apakah akan membangun infrastruktur tempat pendaratan ikan atau usulan pembangunan lainnya. Sebaliknya, dalam konteks UU No. 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan kedaulatan pengaturan program pembangunan terletak pada pemerintah kabupaten/kota.

Perbedaan sudut pandang pembangunan ini menjadi dilema bagi aparat desa untuk menyusun program strategis yang dibutuhkan masyarakat setempat. Di sisi lain, aparat desa dipastikan tidak mampu menangkis intervensi dari pejabat kabupaten/kota yang merujuk pembangunan pesisir dengan UU No. 1/2014 tersebut. Di sinilah masalah rencana pembangunan desa pesisir berawal. Idealnya, sebelum dana desa dikucurkan pada Juni atau Juli, persoalan sudut pandang ini telah diselesaikan oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi dan KKP. Dengan demikian ketika dana dikucurkan, tidak lagi terjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota dan pada akhirnya dana itu bisa digunakan secara efektif dan efisien.

Jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat pesisir tetap terbelit persoalan klasik, yaitu buruknya infrastruktur pendukung penangkapan ikan, sanitasi dan kemiskinan yang kian mencekik leher. Mereka tetap bergantung pada agen ikan yang membeli dengan harga murah, dan mengeruk laba sebesar mungkin dengan menjual ikan itu ke pasar lokal dan pasar ekspor. Hal ini terjadi karena buruknya sistem perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Umumnya,

usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan sangat sedikit yang ditampung dalam program prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dengan demikian, kawasan pesisir tetap tidak akan menjadi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan di kabupaten/kota biasanya mengacu pada landasan kepentingan politik. Daerah yang menjadi basis dukungan politik politisi dan kepala daerah akan mendapat bongkahan besar "kue" pembangunan.

Masalah yang lain adalah minimnya sumber daya manusia di daerah pesisir. Untuk itu, pemerintah perlu membuat pendampingan khusus terhadap masyarakat pesisir sehingga para pendamping ini bisa membantu masyarakat untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program yang dilakukan. Idealnya, pendampingan terhadap masyarakat desa dilakukan oleh tim independen, di luar kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Para PNS di kecamatan dan kabupaten/kota sudah terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari sehingga tidak efektif jika menggunakan jasa mereka melakukan pendampingan.

Pendamping independen ini melekat dan menempel di komunitas desa. Sehingga, bisa benar-benar

melihat realitas sosial, ekonomi dan politik di tingkat desa. Pada akhirnya, pendamping bisa memberikan masukan pada desa tentang program prioritas yang dibutuhkan desa tersebut. Pendamping hanya berkoordinasi dengan pejabat kecamatan dan kabupaten/kota. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan.

Pendamping ini bisa pula sejenis "mata-mata" untuk aparaturnya militer. Jika kapal asing mencuri ikan di perairan Indonesia, para pendamping dibantu nelayan setempat bisa melaporkan peristiwa itu pada aparaturnya militer (Pol Airud dan TNI AL). Sehingga, aksi pencurian ikan bisa diatasi dan sanksi terberat yaitu menenggelamkan kapal asing bisa dilakukan di perairan Indonesia. Tugas dan fungsi pendamping independen ini bisa multifungsi dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berbagai kajian membuktikan bahwa otonomi daerah melahirkan "raja" baru di tingkat kabupaten/kota. Sehingga, kerap kali kepala daerah setengah hati menjalankan program nasional tersebut. Sejatinya, program nasional harus disokong dengan program sejenis di tingkat daerah. Sehingga, pos dana yang digunakan bisa bersumber dari APBN dan APBD.

Hal ini juga akan terjadi untuk program maritim dan pemberdayaan masyarakat pesisir Presiden Joko Widodo. Untuk itu, perlu dibentuk formula koordinasi dan komitmen bersama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komunikasi intensif antar pemerintah itu bisa menimbulkan rasa memiliki, bahwa program pusat juga program daerah yang pada akhirnya untuk mengentaskan persoalan kemiskinan dan tertinggal masyarakat pesisir. Komitmen pemerintah daerah ini perlu dilakukan secara nyata. Bukan sebatas wacana dan retorika di media massa.

Kendala Pengembangan Maritim

Untuk memaksimalkan potensi laut, tentu berbagai kendala telah menanti penanganan secepatnya. Kendala ini dibiarkan bertahun-tahun, sejak rezim Orde Baru hingga pemerintahan sebelumnya. Kendala utama adalah mengubah paradigma pembangunan nasional dari berorientasi industri ke pengembangan ekonomi kelautan dan pertanian. Hal ini mengingat geografis Indonesia merupakan kompilasi ideal maritim dan agraris.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus memberikan panduan khusus, menyatu-

kan pandangan kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Tiga kementerian ini memiliki hubungan erat untuk memaksimalkan potensi laut. Misalnya, jika nelayan atau masyarakat pesisir mengalami kendala sektor permodalan, maka Kementerian Koperasi dan UKM bisa membantu penyaluran dana KUR pada bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Tahun lalu, total KUR yang disalurkan sebesar Rp 36 triliun (Komite KUR, 2013). Dari jumlah itu, sektor kelautan dan perikanan hanya memperoleh 11 persen. Selebihnya disalurkan ke sektor pertanian, jasa dan industri kecil lainnya. Ini menandakan, nelayan belum memiliki akses yang baik terhadap KUR. Idealnya, nelayan mendapat porsi yang besar dari kredit ini, sehingga mereka bisa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan melaut.

Program lain adalah memperbanyak UMKM dan koperasi yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil laut. Mengolah ikan (ikan air tawar dan laut) menjadi produk setengah jadi, atau produk jadi seperti sarden kualitas ekspor. Kendala UMKM dan koperasi laut selama ini di sektor permodalan, pasar dan SDM. Di sinilah peran Kementerian Koperasi dan UKM untuk

membantu sektor permodalan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan SDM dan pasar. Serta Kementerian Pertanian mendistribusikan hasil pertanian lewat jalur laut baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Tahun 2004 Indonesia tercatat sebagai negara ke lima pengekspor ikan segar. Sejatinya, jika produk ikan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, maka ekspor hasil laut kita akan terdongkrak ke posisi satu atau dua dunia mengalahkan Jepang. Peningkatan ekspor produk jadi ini bisa meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Jika asumsinya produk ekspor ikan setengah jadi atau jadi di setiap kabupaten menghasilkan Rp 10 miliar per bulan maka hasilnya mencapai Rp 5,3 triliun. Jumlah ini baru dari hasil produksi ikan laut, belum potensi laut lainnya seperti rumput laut, dan lain sebagainya.

Selain itu, infrastruktur pendukung sangat lemah. Masih sangat minim ditemui *cold storage* (mesin pendingin) pada lokasi-lokasi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga belum melengkapi fasilitas TPI dengan menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN). Sehingga, nelayan masih kesulitan mendapatkan ba-

han bakar. Soal infrastruktur, Indonesia tertinggal jauh dengan Jepang yang memiliki 3.000 buah pelabuhan perikanan, artinya setiap 11 kilometer panjang pantai negeri sakura itu membangun satu unit pelabuhan. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki 5.000 pelabuhan perikanan (satu pelabuhan untuk 162 kilometer panjang pantai). Sebagian besar pelabuhan ini pun sudah telantar dan tidak terawat.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan potensi laut sangat minim. Nelayan selama ini hanya menangkap ikan langsung menjualnya ke pedagang pengumpul. Sejatinya, nelayan bisa menjual ikan segar itu ke pedagang yang bergerak di bidang ekspor jika mereka memiliki *cold storage* yang memadai.

Kendala lainnya, komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kelautan masih sangat minim. Era otonomi daerah memberikan kewenangan terbesar untuk membangun daerahnya terletak pada bupati/wali kota. Sayangnya, tidak semua bupati/walikota memiliki konsep pembangunan kelautan yang memadai. Laut masih dianggap sebelah mata, dilupakan dan ditinggalkan. Pemerintah daerah masih berpikir instan

dengan mengundang investor sebanyak-banyaknya membangun industri seperti industri kelapa sawit.

Pemerataan Pembangunan

Melihat persoalan yang ada, diperlukan komitmen dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi negeri bahari ini. Presiden sebagai pemimpin tertinggi di negara ini harus memberikan kebijakan khusus, *warning* pemerintah daerah (gubernur/walikota/bupati) untuk pro terhadap laut. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah memiliki konsep yang sama untuk memanfaatkan potensi laut demi kesejahteraan anak bangsa. Tentu, seluruh kebijakan yang diambil terkait laut harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan konflik warga lokal yang sebenarnya bisa dihindari sejak dini.

Selain itu, pemerataan pembangunan kelautan juga perlu dilakukan. Saat ini, sebagian besar kawasan timur dan barat Indonesia belum mendapat perhatian serius. Pembangunan kelautan hanya tersentuh di Pulau Jawa. Selama ini, potensi laut di kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, NT, Bangka-Belitung, Papua, Aceh dan Riau belum tergarap maksimal.

Daerah itu menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa.

Untuk itu perlu dibangun *cluster* industri perikanan di setiap provinsi. Setiap provinsi yang memiliki panjang pantai 11 kilometer dibangun pusat pengolahan hasil laut. Dari pusat pengolahan ini akan menghasilkan produk jadi atau setengah jadi ikan kualitas ekspor. Pasar dari *cluster* industri ini juga harus dijaga, misalnya untuk produk ikan Indonesia timur dijual ke Timur Tengah, kawasan Indonesia barat dijual ke Eropa, dan negara lainnya. Dengan demikian, persaingan bisnis antar kawasan laut kita tetap terjaga. Tentu, langkah ini harus diintervensi oleh pemerintah.

Selain itu, sektor jasa transportasi via laut dalam istilah Jokowi "tol laut" juga belum berjalan lancar. Salah satu contohnya, sampai saat ini belum ada kapal cargo yang mengangkut barang dari Jakarta ke Aceh. Begitu juga untuk kawasan Papua. Hal ini mengakibatkan harga jual di daerah sangat mahal.

Jika jalur transportasi ini diperbaiki, maka distribusi barang semakin lancar, jalan darat bebas macet serta harga barang di daerah semakin murah. Sebaliknya, jalur ekspor via laut juga patut dikembangkan.

Sehingga, barang masuk-keluar pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin lancar. Jika kondisi ini berjalan lancar, maka akan menciptakan keuntungan bersama antara rakyat, pengusaha dan pemerintah.

Terakhir, perlu dibuat produk hukum yang memuluskan pembangunan berbasis kelautan. Perundang-undangan atau peraturan daerah ini harus membela kepentingan nelayan, pengusaha bidang kelautan, wisata, dan lain sebagainya dari pusat hingga daerah. Jangan melahirkan produk hukum yang bisa "mengeringkan" laut kita. Misalnya, produk hukum yang mengundang pengusaha asing sebanyak-banyaknya menangkap ikan di laut Indonesia.

Pada akhirnya, pengamanan laut menjadi sisi pendamping pengembangan potensi laut. Satuan polisi air dan TNI AL harus dibekali kemampuan dan peralatan yang mumpuni untuk menjaga perairan Indonesia. Sehingga, bebas dari penjarahan kapal asing yang kerap mengambil ikan dalam jumlah besar di laut nusantara.

Kini, saatnya membuat laut Indonesia berdaulat, agar Indonesia menjadi negara hebat. Semua komponen bangsa harus bersepakat untuk mendukung kon-

sep pengembangan ekonomi kelautan bangsa ini. Sudah saatnya negeri ini fokus mengembangkan potensi bahari. Agar anak cucu sejahtera selama-lamanya. Jangan sampai pembangunan maritim setengah hati. Selalu berkelindan pada tataran wacana dan retorika di media massa.

Daftar Pustaka

- Apridar. 10 Februari 2015. *Mengawal Pembangunan Pesisir*. Harian Sinar Harapan Jakarta
- Apridar, Muhammad Karim, Suhana. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Dinamika, Yarmen. 2013. *Potensi Migas Aceh*. Makalah Acara Pelatihan Migas Aji-ExxonMobil Lhokseumawe.
- Dahuri, Rokhmin. 1 Januari 2008. *Transformasi Kekayaan Laut untuk Kemajuan, Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa*. Artikel ditulis pada dahuri.wordpress.com
- . 2004. *Perjuangan Anak Nelayan Membangun Kelautan dan Perikanan*. Bening Publishing Jakarta

Haryadi Sutisna, Deddy. 10 Juli 2012. *Potensi Ekonomi Kelautan Mampu Menyejahterakan Rakyat*. Dewan Kelautan Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.

Komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2013. *Laporan Realisasi KUR 2013*. Komite-KUR.com Jakarta

Republika. 17 Desember 2014. *Indonesia Butuh 12 Kapal Selam untuk Amankan Laut*. Jakarta

-oo0oo-